

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan gizi terus menjadi topik kekhawatiran utama di Indonesia karena dampak buruknya terhadap kualitas sumber daya manusia. Tingginya angka *stunting* dan *wasting* pada anak balita, anemia, dan defisit energi kronik (KEK) pada ibu hamil merupakan beberapa isu gizi buruk yang masih menjadi pemberitaan. Kurang gizi pada masa kehamilan meningkatkan risiko gizi buruk pada balita, termasuk *stunting* dan dapat menyebabkan berat badan lahir rendah pada bayi baru lahir.

Anak balita yang mengalami *stunting* akibat gizi buruk kronis, khususnya pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), mengalami pertumbuhan terhambat. Jika tinggi atau panjang badan seorang anak berada di bawah pedoman nasional yang berlaku untuk usianya, maka ia dianggap *stunting*. Tujuan dari penurunan angka *stunting* adalah untuk mengatasi penyebab utama permasalahan gizi. Hal ini mencakup inisiatif untuk meningkatkan praktik pemberian makanan pada anak dan bayi, layanan kesehatan (pencegahan dan pengobatan), kondisi lingkungan (air bersih dan sanitasi), serta akses bayi baru lahir dan anak terhadap makanan padat nutrisi. Kesehatan dan asupan gizi ibu dan anak dipengaruhi langsung oleh keempat faktor tersebut. Intervensi yang menasar keempat aspek tersebut diperkirakan akan mengurangi permasalahan gizi, termasuk kekurangan dan kelebihan gizi.

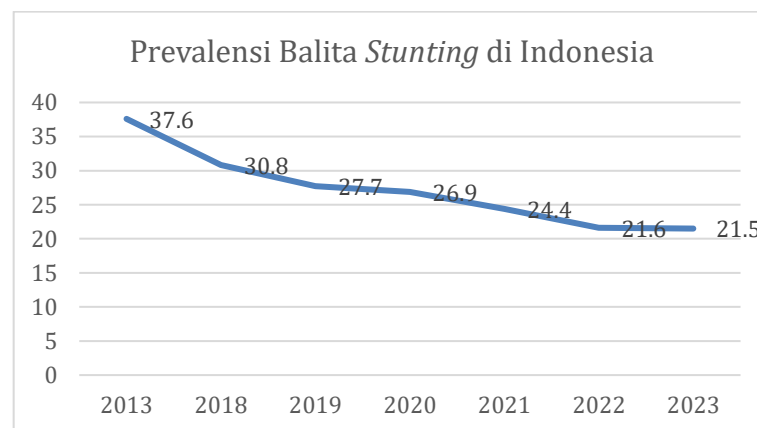
Rencana Aksi Nasional Penanganan *Stunting* diperkenalkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada bulan Agustus 2017. Rencana Aksi Nasional ini menyoroti kegiatan konvergensi di tingkat nasional, regional, dan desa untuk memberikan prioritas pada Intervensi Gizi Spesifik dan Gizi Sensitif dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sampai anak mencapai usia enam tahun. Penurunan angka *stunting* sebesar 30% terjadi ketika ibu hamil dan anak mendapatkan perawatan nutrisi khusus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang sering dilakukan oleh sektor kesehatan. Tujuh puluh persen penurunan angka *stunting* berasal dari Intervensi Gizi Sensitif yang dilaksanakan melalui beragam upaya pembangunan yang dilakukan di luar sektor kesehatan. Masyarakat luas merupakan khalayak yang dituju, bukan hanya ibu hamil dan anak kecil dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2017).

Program nasional pencegahan *stunting* didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Masing-masing instansi terkait kemudian menafsirkan peraturan tersebut untuk memberikan rincian lebih lanjut mengenai peraturan terkait pencegahan *stunting*. Sebagai tanggapan, upaya terkoordinasi yang terdiri dari berbagai kementerian dan organisasi terkait diluncurkan oleh pemerintah untuk memerangi *stunting*. Tiga puluh empat provinsi dan seratus kabupaten diidentifikasi sebagai prioritas penurunan *stunting* pada tahun 2018. Enam puluh kabupaten tambahan ditambahkan pada tahun berikutnya. Untuk memenuhi target *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu penurunan prevalensi *stunting*

hingga 40% pada tahun 2025. Adanya kemitraan lintas sektor diharapkan dapat menurunkan prevalensi *stunting* di Indonesia.

Prioritas utama sektor kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024 adalah *stunting*. Penanganan masalah *stunting* di Indonesia dinilai cukup baik terlihat dari capaian Pembangunan 2015-2019, dimana prevalensi *stunting* pada balita status awal berdasarkan hasil Riskesdas 2013 sebesar 37,2% dan mengalami penurunan signifikan dalam capaian terakhir pada tahun 2018 menjadi 30,8%. Melalui angka tersebut Pemerintah Indonesia menargetkan dalam RPJMN 2020-2024 angka *stunting* di Indonesia mampu mencapai 14%. Target tersebut tentunya membutuhkan komitmen dan kemampuan semua *stakeholders* yang terlibat agar mampu menurunkan angka *stunting*.

Gambar 1.1 Prevalensi Balita *Stunting* di Indonesia



Sumber : Litbangkes 2021 & SKI 2023 (Diolah oleh peneliti)

Berdasarkan Gambar 1.1, selama sepuluh tahun terakhir, prevalensi balita *stunting* di Indonesia mengalami penurunan. Menurut hasil SKI, pada tahun 2013 prevalensi *stunting* di Indonesia menunjukkan pada angka 37,6%. Pada 2018

menjadi sebesar 30,8% dan 2019 menurun menjadi sebesar 27,7%. Namun demikian, dikarenakan adanya pandemi COVID-19 dan adanya kendala dan keterbatasan, baik dari sisi ketersediaan sumber data, variabel yang akan digunakan, metode analisis maupun *modeling* yang dihasilkan maka proses analisis prediksi angka *stunting* tahun 2020 baru dapat diselesaikan pada bulan Agustus 2021. Hasil prediksi pada 2020 prevalensi balita *stunting* sebanyak 26,9% (Litbangkes, 2021). Pada 2021 prevalensi *stunting* sebesar 24,4%. Pada tahun selanjutnya 2022 menjadi sebesar 21,6% dan terakhir pada 2023 prevalensi *stunting* di Indonesia hanya mengalami penurunan sebesar 21,5%. Namun hal tersebut belum mampu mencapai target RPJMN 2020–2024, yaitu 14% pada tahun 2024.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah mengatur upaya penurunan *stunting* di provinsi tersebut. Mengingat kasus *stunting* pada anak balita di wilayah Jawa Tengah relatif banyak, maka berbagai pihak termasuk organisasi pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan, perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan pemangku kepentingan lainnya perlu mengambil tindakan yang komprehensif dan terkoordinir. Tujuan peraturan gubernur tersebut diharapkan pada 2023 dapat menurunkan angka *stunting* pada anak baduta dan balita menjadi kurang dari 20%. Namun pada tahun 2023, Provinsi Jawa Tengah masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Temuan SKI pada tahun 2023 menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* di Jawa Tengah sebesar 20,7%.

Bupati Rembang telah mengambil langkah-langkah untuk menindak lanjuti Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan

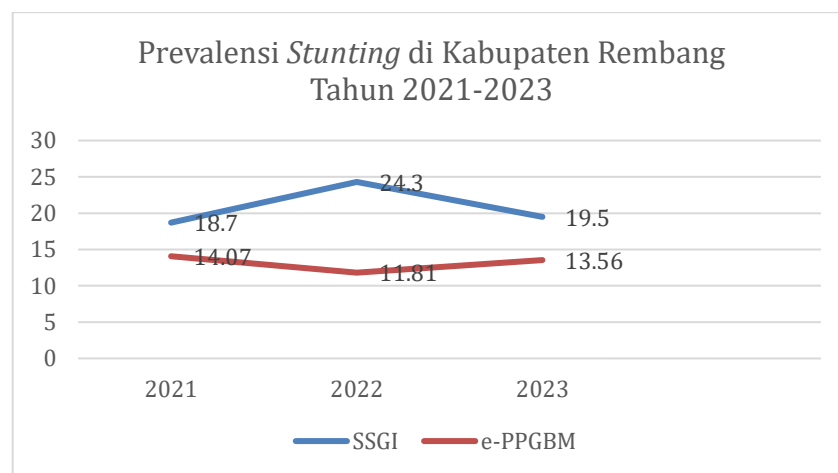
Pencegahan *Stunting* Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2020, Bupati Rembang mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Rembang. Kebijakan ini menjadi dasar hukum yang mengatur langkah-langkah penanganan permasalahan *stunting* di Kabupaten Rembang. Selanjutnya, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, *stunting* menjadi masalah utama pada sektor kesehatan yang harus diselesaikan, di samping masalah angka kematian ibu dan bayi serta gizi buruk.

Begitu pentingnya penanganan masalah *stunting* ini, kemudian Presiden mengambil langkah serius dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Salah satu inisiatif yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia adalah pembentukan tim khusus yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka *stunting* secara nasional. Tim tersebut dikenal dengan nama Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS).

Bupati Rembang dalam menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, kemudian menerbitkan Keputusan Bupati Rembang Nomor 463/0970/2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Rembang. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) tersebut dibentuk guna dapat menekan jumlah kasus *stunting* yang ada di Kabupaten Rembang. Tugas dan fungsi TPPS tersebut tertuang pada Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 463/0970/2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Rembang. Di dalam TPPS tersebut terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Di dalam Tim Pelaksana terdapat

empat bidang yang mempunyai peran masing-masing, yaitu Koordinator Bidang Intervensi Sensitif dan Spesifik, Koordinator Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga, Koordinator Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan, dan Koordinator Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge*.

Gambar 1.2 Prevalensi Balita *Stunting* di Kabupaten Rembang



Sumber : SSGI & e-PPGBM, 2023 (Diolah oleh peneliti)

Berdasarkan data SSGI (Survey Status Gizi Indonesia) pada Gambar 1.2 menunjukkan bahwa tingkat prevalensi balita *stunting* di Kabupaten Rembang selama tiga tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan. Pada 2021 prevalensi *stunting* sebesar 18,7%, tahun 2022 naik menjadi 24,3% dan pada tahun 2023 turun menjadi 19,5%. Data tersebut menunjukkan bahwa angka *stunting* di Kabupaten Rembang masih cukup tinggi. Sedangkan menurut data dari e-PPGBM prevalensi balita *stunting* di Kabupaten Rembang tahun 2021 sebanyak 14,07%. Pada 2022 prevalensi balita *stunting* menurun menjadi 11,81%. Pencatatan data terakhir pada 2023 prevalensi balita *stunting* di Kabupaten Rembang sebesar 13,56%. Data tersebut menunjukkan bahwa angka *stunting* di Kabupaten Rembang mengalami peningkatan dalam satu tahun terakhir.

Tabel 1.1 Prevalensi *Stunting* Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Rembang

No.	Nama Kecamatan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Jumlah Kasus	P (%)	Jumlah Kasus	P (%)	Jumlah Kasus	P (%)
1.	Sumber	176	8,43	154	6,80	190	8,77
2.	Bulu	227	14,24	165	11,96	203	13,40
3.	Gunem	119	8,57	105	7,42	173	14,82
4.	Sale	364	16,91	312	14,36	335	17,17
5.	Sarang	483	11,66	525	13,69	711	19,18
6.	Sedan	802	21,77	509	13,84	410	14,28
7.	Pamotan	573	17,65	543	15,98	522	18,91
8.	Sulang	445	20,81	281	13,02	367	17,49
9.	Kaliori	365	13,93	282	11,00	266	11,96
10.	Rembang	643	11,30	476	9,71	473	10,70
11.	Pancur	399	22,32	219	13,05	268	14,16
12.	Kragan	167	4,31	283	7,96	221	6,39
13.	Sluke	415	21,91	273	13,79	262	13,63
14.	Lasem	362	11,77	353	11,93	280	11,83
Jumlah		5.540	14,07	4.480	11,81	4681	13,56

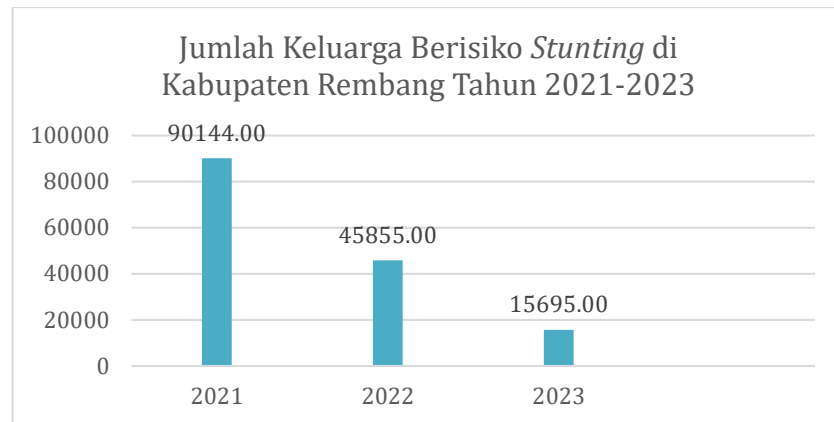
Sumber : e-PPGBM, 2023 (Diolah oleh peneliti)

Berdasarkan data e-PPGBM pada Tabel 1.1 jumlah balita yang mengalami *stunting* pada tahun 2021 di Kabupaten Rembang adalah sejumlah 5.540 balita atau 14,07% dari 39.377 balita. Kecamatan Sedan menjadi kecamatan dengan jumlah kasus *stunting* terbanyak dengan 802 kasus, posisi kedua dengan jumlah kasus

terbanyak adalah Kecamatan Rembang sebanyak 643 kasus, dan di posisi ketiga ditempati oleh Kecamatan Pamotan sebanyak 573 kasus. Pada tahun 2022, terdapat 4.480 balita *stunting* di Kabupaten Rembang atau 11,81% dari total 37.944 balita. Kecamatan Pamotan menjadi kecamatan dengan jumlah kasus *stunting* terbanyak dengan 525 kasus, posisi kedua dengan jumlah kasus terbanyak adalah Kecamatan Sedan sebanyak 509 kasus, dan selanjutnya di posisi ketiga ditempati oleh Kecamatan Sarang sebanyak 543 kasus. Pada tahun 2023 jumlah balita *stunting* di Kabupaten Rembang mengalami kenaikan menjadi sebanyak 4.681 balita atau 13,56% dari 34.521 balita. Kecamatan Sarang menjadi kecamatan dengan jumlah kasus *stunting* terbanyak dengan 711 kasus, posisi kedua dengan jumlah kasus terbanyak adalah Kecamatan Pamotan sebanyak 522 kasus, dan posisi ketiga ditempati oleh Kecamatan Rembang sebanyak 473 kasus.

Selanjutnya, keluarga dengan anak perempuan remaja, calon pengantin, ibu hamil, anak usia 0-23 bulan atau 24-59 bulan, pendidikan orang tua yang rendah, lingkungan yang tidak sehat, dan air minum yang tidak layak merupakan kelompok masyarakat yang memiliki satu atau lebih faktor risiko terjadinya *stunting*. Berdasarkan Verval Pendataan Keluarga, jumlah Keluarga Berisiko *Stunting* di Kabupaten Rembang tahun 2021 sebanyak 90.144 KRS, tahun 2022 sebanyak 45.855 KRS, dan tahun 2023 sebanyak 15.695 KRS. Data jumlah Keluarga Berisiko *Stunting* di Kabupaten Rembang tahun 2021 berdasarkan data Verval Pendataan Keluarga dapat dilihat pada Gambar 1.3 sebagai berikut.

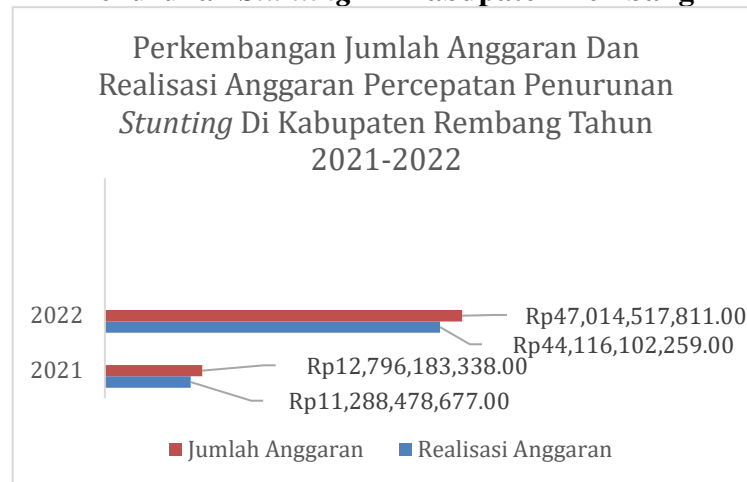
Gambar 1.3 Jumlah Keluarga Berisiko *Stunting* di Kabupaten Rembang



Sumber : Verval PK, 2023 (Diolah oleh peneliti)

Dalam pencegahan *stunting*, Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengalokasikan biaya khusus untuk menurunkan prevalensi balita *stunting* di Kabupaten Rembang. Pembiayaan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Provinsi, Kabupaten, Desa, serta sumber pendanaan tambahan yang sah dan tidak mengikat. Setiap tahunnya dana alokasi untuk percepatan penurunan *stunting* yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Rembang semakin besar. Pada 2021 jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp12.796.183.338,00 dan realisasi anggarannya sebesar Rp11.288.478.677,00. Pada 2022 jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp47.014.517.811,00 dan realisasi anggarannya sebesar Rp44.116.102.259,00. Berikut grafik perkembangan anggaran yang digunakan untuk percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Rembang.

Gambar 1.4 Perkembangan Anggaran Dan Realisasi Anggaran Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kabupaten Rembang



Sumber : Bappeda Kabupaten Rembang, 2023 (Diolah oleh peneliti)

Pemerintah Kabupaten Rembang selaku pemegang tanggung jawab tertinggi di daerahnya mempunyai tugas yang amat berat untuk mengatasi masalah *stunting* ini. Tentu bukan perkara yang mudah, karena pemerintah harus cerdas dalam merumuskan strategi-strategi berdasarkan faktor-faktor penyebab terjadinya *stunting*. Guna mencegah dan menurunkan prevalensi *stunting* di Kabupaten Rembang diperlukan pelaksanaan kebijakan yang baik melalui koordinasi dan kolaborasi dari berbagai pihak antara lain organisasi daerah, lembaga masyarakat, swasta, perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Rembang”**

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan peneliti dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut.

1. Masih tingginya prevalensi *stunting* di Kabupaten Rembang.
2. Masih tingginya angka Keluarga Berisiko *Stunting* di Kabupaten Rembang.
3. Masih kurang optimalnya realisasi anggaran percepatan penurunan *stunting*.

Berdasarkan fakta dan data yang telah dijabarkan pada latar belakang dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Temuan penelitian ini secara teori seharusnya dapat memajukan bidang ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti mendapatkan ilmu pengetahuan dari penelitian ini dan dapat dilaksanakan dari kegiatan pembelajaran selama perkuliahan.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Rembang

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan solusi untuk memperbaiki permasalahan *stunting* di Kabupaten Rembang, sehingga dapat menunjang pelaksanaan kebijakan yang lebih baik kedepannya.

c. Bagi Pembaca

Pembaca dapat mengetahui lebih jauh implementasi Kebijakan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Rembang berkat penelitian ini.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI/ TAHUN/ JURNAL	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
1.	Yoan Litha Pormes, dkk (2023).	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian <i>Stunting</i> di Desa Trana Kecamatan Teon Nila serua Kabupaten Maluku Tengah.	Penelitian ini menggunakan teori dari Van Metter Van Horn.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa kondisi lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, dan lingkungan politik belum sepenuhnya mendukung keberhasilan kebijakan pencegahan dan

					pengendalian <i>stunting</i> .
2.	Dominikus Fernandez, dkk (2024)	Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi kebijakan pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Kupang.	Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Grindle.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan terdapatnya <i>performance implementation</i> yang bervariasi antar wilayah amatan sebagai akibat konteks kebijakan meskipun implementasi kebijakan pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> didasari dan didukung oleh kebijakan dan <i>street level implementation</i> yang sama.
3.	Ilham Nur Hanifan Maulana, dkk (2022)	Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik dalam penanganan <i>stunting</i> di Kabupaten Malang mengacu pada Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Upaya Pencegahan <i>Stunting</i> .	Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Donald Van Meter & Carl Van Horn.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama pandemi COVID-19, beberapa kegiatan intervensi gizi spesifik tidak dapat dilaksanakan karena <i>refocusing</i> anggaran kesehatan. Meskipun demikian, dukungan dari agen pelaksana kebijakan seperti petugas gizi di puskesmas dan bidan desa tetap menjadi kunci dalam intervensi gizi spesifik sesuai dengan

					rencana aksi integrasi <i>stunting</i> .
4.	Qothrun Nada Ramadhani dan Weni Rosdiana (2023).	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sebuah Implementasi Kebijakan pada Peraturan Bupati nomor 7 tahun 2019 terkait Implementasi Kebijakan Program penanggulangan <i>Stunting</i> di Dinas Kesehatan Lamongan	Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada masalah dalam pelaksanaan program, termasuk kurangnya data balita penderita <i>stunting</i> , keterbatasan sumber daya manusia, dan dana yang belum mencapai semua sasaran. Waktu juga menjadi faktor terbatas dalam kegiatan, dan komunikasi dengan masyarakat masih kurang baik. Meskipun demikian, karakteristik agen pelaksana sesuai dan sikap mereka mendukung keberhasilan implementasi. Lingkungan ekonomi dan sosial masih menjadi hambatan, meskipun lingkungan politik mendukung.
5.	Erlin Friska, Helen Andriani (2022).	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan pencegahan	Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III dan Van	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan namun intervensi gizi

		<i>stunting</i> pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Kudus.	Meter dan Van Horn.		sensitif masih berjalan belum maksimal, komunikasi dilakukan secara virtual, sumber daya yang tersedia mencukupi, ada kebijakan pedoman yang diketahui dan dipahami oleh pelaksana kebijakan, dan koordinasinya belum terjalin optimal, lingkungan ekonomi dan sosial kurang mendukung dan lingkungan politik memadai untuk mendukung kebijakan.
6.	Faradiba Aisyah (2023)	Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai komponen-komponen utama kebijakan, proses implementasinya dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaannya.	Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Charles O. Jones.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan kemajuan dalam penurunan angka <i>stunting</i> , peningkatan kesadaran, dan partisipasi masyarakat. Namun, tantangan yang terus ada, seperti terbatasnya sumber daya dan infrastruktur, memerlukan perhatian berkelanjutan untuk mencapai pengurangan <i>stunting</i> yang berkelanjutan.
7.	Sudirman, dkk (2023).	Penelitian ini bertujuan untuk	Penelitian ini menggunakan	Penelitian ini menggunakan	Hasil penelitian ini menunjukkan

		mengetahui implementasi kebijakan penurunan <i>stunting</i> di Puskesmas Biromaru Kabupaten Sigi.	teori implementasi kebijakan dari Edward III.	pendekatan kualitatif.	bahwa implementasi kebijakan penurunan <i>stunting</i> di Puskesmas Biromaru Kabupaten Sigi belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penerapan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Kendala-kendala termasuk kurangnya sumber daya seperti timbangan dan alat pengukur tinggi badan, serta variasi anggaran antar desa yang mempengaruhi distribusi fasilitas.
8.	Susilawati, dkk (2023).	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan program pencegahan <i>stunting</i> di Kelurahan Cikawao Kecamatan Lengkong Kota Bandung.	Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Edward III.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Program Pencegahan <i>Stunting</i> di Kelurahan Cikawao Kecamatan Lengkong Kota Bandung sudah berjalan cukup baik. Namun ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan

					seperti komunikasi yang meliputi faktor transmisi, kejelasan dan konsistensi antara pelaksana dengan masyarakat, sumber daya yang meliputi staf, informasi, fasilitas dan kewenangan juga perlu ditingkatkan.
9.	Djeni Ruliarita Konay, dkk (2023).	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pencegahan <i>stunting</i> di Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang.	Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Daniel H. Mazmanian dan Paul A. Sabatier.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan <i>stunting</i> di Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang.
10.	Yani Srimulyani, dkk (2023).	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Garut, medikalisasi upaya yang dilakukan dan juga hambatan/ hambatan dalam pelaksanaannya.	Penelitian ini menggunakan teori Merile S. Grindle	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut telah menerapkan kebijakan penurunan angka <i>stunting</i> dengan mengeluarkan peraturan dan membentuk organisasi pelaksana yaitu TPPS, TPK, Satgas <i>Stunting</i> , perguruan tinggi, dan organisasi

					masyarakat lainnya, serta menyediakan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana/fasilitas untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Beberapa kendala muncul dalam pelaksanaan kegiatan.
--	--	--	--	--	---

Penelitian pertama yang berjudul, “Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan *Stunting* Di Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah” yang ditulis oleh Yoan Litha Pormes, dkk (2023). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian *Stunting* di Desa Trana Kecamatan Teon Nila serua Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini menggunakan model implementasi dari van Meter dan van Horn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa masih terdapat indikator-indikator yang belum tercapai dengan baik. Sumber daya manusia di tingkat bawah khususnya kader masih kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Karakteristik organisasi pelaksana belum terpenuhi dengan baik. Sikap para pelaksana khususnya dalam pemahaman masyarakat terhadap kebijakan tersebut masih kurang. Komunikasi dan koordinasi belum maksimal, karena masih terdapat kegiatan yang tidak tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Kondisi lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, dan lingkungan politik belum sepenuhnya mendukung keberhasilan kebijakan pencegahan dan pengendalian *stunting*.

Penelitian kedua yang berjudul, “Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kupang” yang ditulis oleh Dominikus Fernandez, dkk (2024). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi kebijakan pencegahan dan penurunan *stunting* di Kabupaten Kupang. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Grindle. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapatnya *performance implementation* yang bervariasi antar wilayah amatan sebagai akibat konteks kebijakan meskipun implementasi kebijakan pencegahan dan penurunan *stunting* didasari dan didukung oleh kebijakan dan *street level implementation* yang sama. Simpulan yang dapat disampaikan bahwa konteks kebijakan selalu menentukan kinerja implementasi serta disarankan agar implementor selalu lebih intens dan aktif memerhatikan variasi lingkungan kebijakan.

Penelitian ketiga yang berjudul, “Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik sebagai Upaya Penanganan *Stunting* di Kabupaten Malang” yang ditulis oleh Ilham Nur Hanifan Maulana, dkk (2022). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Malang mengacu pada Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Upaya Pencegahan *Stunting*. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Donald Van Meter & Carl Van Horn. Hasil dari penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa ditengah pandemi COVID-19, beberapa kegiatan intervensi gizi spesifik tidak terlaksana akibat *refocusing* anggaran kesehatan. Namun, dukungan agen pelaksana kebijakan seperti petugas

gizi di puskesmas dan bidan desa tetap menjadi aktor kunci intervensi gizi spesifik dilapangan sesuai dengan *timeline* aksi integrasi *stunting*. Untuk beradaptasi pada situasi ini, intervensi gizi spesifik diarahkan pada kunjungan rumah dan janji temu sebagai upaya menjangkau kelompok sasaran yang lebih luas. Perlunya regulasi teknis sebagai tindak lanjut Perbup Malang Nomor 33 Tahun 2018 yang mengakomodir penanganan *stunting* melalui intervensi gizi spesifik dimasa pandemi secara optimal.

Penelitian keempat yang berjudul, “Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan *Stunting* di Dinas Kesehatan Lamongan” yang ditulis oleh Dian Rosa Sunaryo, dkk (2023). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sebuah Implementasi Kebijakan pada Peraturan Bupati nomor 7 tahun 2019 terkait Implementasi Kebijakan Program penanggulangan *Stunting* di Dinas Kesehatan Lamongan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Lamongan, jumlah prevalensi *stunting* telah menurun hingga 16% berkat program **ZERO STUNTING** yang dibuat oleh Bupati Lamongan dengan bantuan Dinas Kesehatan setempat. Namun, masih ada masalah dalam pelaksanaan program, termasuk kurangnya data balita penderita *stunting*, keterbatasan sumber daya manusia, dan dana yang belum mencapai semua sasaran. Waktu juga menjadi faktor terbatas dalam kegiatan, dan komunikasi dengan masyarakat masih kurang baik. Meskipun demikian, karakteristik agen pelaksana sesuai dan sikap mereka mendukung

keberhasilan implementasi. Lingkungan ekonomi dan sosial masih menjadi hambatan, meskipun lingkungan politik mendukung.

Penelitian kelima yang berjudul, “Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan *Stunting* Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Kudus” yang ditulis oleh Erlin Friska, Helen Andriani (2022). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan pencegahan *stunting* pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Kudus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Edward III dan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan namun intervensi gizi sensitif masih berjalan belum maksimal, komunikasi dilakukan secara virtual, sumber daya yang tersedia mencukupi, ada kebijakan pedoman yang diketahui dan dipahami oleh pelaksana kebijakan, dan koordinasinya belum terjalin optimal, lingkungan ekonomi dan sosial kurang mendukung dan lingkungan politik memadai untuk mendukung kebijakan. Penerapan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* pada masa pandemi COVID-19 belum berjalan optimal.

Penelitian keenam yang berjudul, “*Implementation Of Stunting Reduction Acceleration Policy In Ponorogo Regency*” yang ditulis oleh Faradiba Aisyah (2023). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai komponen-komponen utama kebijakan, proses implementasinya, dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaannya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori implementasi kebijakan dari Charles O. Jones. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan

kemajuan dalam penurunan angka *stunting*, peningkatan kesadaran, dan partisipasi masyarakat. Namun, tantangan yang terus ada, seperti terbatasnya sumber daya dan infrastruktur, memerlukan perhatian berkelanjutan untuk mencapai pengurangan *stunting* yang berkelanjutan. Studi ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara lembaga pemerintah, penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat agar berhasil mengatasi krisis *stunting* di Kabupaten Ponorogo dan sekitarnya.

Penelitian ketujuh yang berjudul, “*Implementation of Accelerated Stunting Reduction at the Biromaru Public Health Center, Sigi Regency*” yang ditulis oleh Sudirman, dkk (2023). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penurunan *stunting* di Puskesmas Biromaru Kabupaten Sigi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori implementasi Edward III. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan *stunting* di Puskesmas Biromaru Kabupaten Sigi belum berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari belum memadainya penerapan aspek Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Organisasi. Ada beberapa kendala yang menghambat implementasi kebijakan penurunan *stunting*. Sumber daya di Puskesmas Biromaru Kabupaten Sigi masih kurang, terutama dalam hal fasilitas seperti timbangan dan alat pengukur tinggi badan. Tidak semua pusat posyandu menerima sumber daya ini karena keterbatasan anggaran yang berbeda-beda di setiap desa. Hal ini mempengaruhi optimalisasi implementasi kebijakan. Mengenal Struktur Organisasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP), meskipun belum ditetapkan, seluruh petugas menjaga hubungan

kerja yang baik, sebagaimana dibuktikan melalui wawancara yang menunjukkan upaya kolaboratif mereka dalam program ini.

Penelitian kedelapan yang berjudul, “*Implementation of The Stunting Prevention Policy Program In Cikawao Sub-District, Lengkong District, Bandung City*” yang ditulis oleh Susilawati, dkk (2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan program pencegahan *stunting* di Kelurahan Cikawao Kecamatan Lengkong Kota Bandung. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Program Pencegahan *Stunting* di Kelurahan Cikawao Kecamatan Lengkong Kota Bandung sudah berjalan cukup baik. Namun ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan seperti komunikasi yang meliputi faktor transmisi, kejelasan dan konsistensi antara pelaksana dengan masyarakat, sumber daya yang meliputi staf, informasi, fasilitas dan kewenangan juga perlu ditingkatkan. Di sisi lain, disposisi atau perilaku pelaksana kebijakan sudah cukup baik.

Penelitian kesembilan yang berjudul, “*Policy Implementation Of Stunting Prevention In Kupang Tengah District, Kupang Regency*” yang ditulis oleh Djenni Ruliarita Konay, dkk (2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini dengan teori Daniel H. Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapatnya *performance*

implementation yang bervariasi antarwilayah amatan sebagai akibat konteks kebijakan meskipun implementasi kebijakan pencegahan dan penurunan stunting didasari dan didukung oleh kebijakan dan *street level implementation* yang sama.

Penelitian kesepuluh yang berjudul, “*Implementation of Stunting Reduction Policy in Garut Regency*” yang ditulis oleh Yani Srimulyani, dkk (2023). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penurunan *stunting* di Kabupaten Garut, medikalisasi upaya yang dilakukan dan juga hambatan/hambatan dalam pelaksanaannya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini dengan implementasi kebijakan dari Merille S. Grindle. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut telah menerapkan kebijakan penurunan angka *stunting* dengan mengeluarkan peraturan dan membentuk organisasi pelaksana yaitu TPPS, TPK, Satgas *Stunting*, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat lainnya. Pemerintah Daerah Garut telah menyediakan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana/fasilitas untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Beberapa kendala muncul dalam pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu pada lokus dan fokus penelitian. Selain itu, perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini menggunakan beberapa sub fenomena yang terdapat pada regulasi dari Perbup Rembang Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Rembang.

1.5.2 Administrasi Publik

Chandler dan Plano dalam Keban (2014) mendefinisikan administrasi publik sebagai proses pengorganisasian dan koordinasi sumber daya dan personel publik untuk mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi keputusan kebijakan publik. Menurut Dwight Waldo dalam Syafiie (2010:25), Administrasi Publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Siagian (2014) mengatakan bahwa administrasi publik sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara. Menurut McCurdy dalam Keban (2014: 3) mengemukakan bahwa administrasi publik dapat dilihat sebagai suatu poses politik, yaitu sebagai salah satu cara metode memerintah suatu negara dan dapat juga dianggap sebagai cara yang prinsipil untuk melakukan berbagai fungsi negara.

Beddy Iriawan Maksudi (2017:226) dalam bukunya yang berjudul "Dasar-Dasar Administrasi Publik Dari Klasik ke Kontemporer," administrasi publik didefinisikan sebagai suatu proses kerjasama rasional yang dilakukan oleh aparatur negara atau pemerintah. Dalam proses ini, untuk melaksanakan kebijakan yang terkait dengan pencapaian tujuan negara dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan publik, sumber daya dan personel publik harus diorganisir dan dikoordinasikan. Sementara itu, Henry dalam Harbani Pasolong (2014), mengemukakan bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam

hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Dari berbagai definisi yang disajikan oleh para pakar tentang administrasi publik tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan kolaborasi antara sekelompok individu atau organisasi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah demi mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Berbicara mengenai administrasi publik maka tidak terlepas dari pergeseran paradigma administrasi publik yang terjadi selama ini. Pergeseran tersebut dikarenakan paradigma sebelumnya mengalami berbagai masalah dan dipandang sudah tidak relevan dengan situasi saat ini bahkan membuat orang tidak lagi percaya pada paradigma yang ada yang kemudian berusaha membangun paradigma baru.

Terkait dengan pembahasan paradigma maka Thomas S. Khun (Syafie, 2010:26) mengatakan bahwa paradigma adalah suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah, yang dianut suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Lebih ringkasnya paradigma merupakan corak berpikir seseorang atau sekelompok orang. Nicholas Henry dalam Keban (2014:31-33) mengungkapkan bahwa terdapat lima paradigma Administrasi Negara yang diuraikan seperti berikut ini:

- Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Goodnow mengungkapkan bahwa politik harus memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedang administrasi memberi

perhatiannya pada pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan tersebut. Pemisahan antara politik dan administrasi dimanifestasikan oleh pemisahan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pada paradigma ini, administrasi harus dipandang sebagai sesuatu yang bebas nilai dan diarahkan untuk mencapai nilai efisiensi dan ekonomi dari *gouvernement bureaucracy*. Paradigma ini lebih menekankan pada lokus saja yaitu “*gouvernement bureaucracy*” namun kurang menekankan pada fokus.

- Paradigma 2: Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)

Dalam paradigma ini yang menjadi fokus adalah prinsip-prinsip administrasi yang dikemukakan oleh Gulick dan Urwick yaitu: *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting Budgeting*. Prinsip-prinsip administrasi tersebut diperkenalkan sebagai fokus administrasi publik yang dapat diterapkan dimana saja atau bersifat universal sementara lokus dari administrasi publik dinilai kurang jelas sebab prinsip tersebut dapat diterapkan baik pada organisasi pemerintah maupun organisasi swasta.

- Paradigma 3 : Administrasi sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Morstein-Marx seorang editor buku “*Elements of Public Administration*” di tahun 1946 mempertanyakan pemisahan politik dan administrasi sebagai suatu yang tidak mungkin atau tidak realistis, sementara Herbert Simon mengarahkan kritiknya terhadap ketidakkonsistenan prinsip administrasi, dan menilai bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak berlaku universal. Dalam 12 konteks ini, administrasi negara bukannya *value free* atau dapat berlaku dimana saja, tapi justru dipengaruhi nilai-nilai tertentu. Disini terjadi pertentangan antara

anggapan mengenai *value free administration* disatu pihak dengan anggapan akan *value laden politics* lain pihak.

- Paradigma 4: Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Dalam paradigma ini prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Terdapat dua arah perkembangan pada paradigma ini yaitu ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologi sosial dan yang berorientasi pada kebijakan publik. Fokus pada paradigma ini adalah perilaku organisasi, analisis manajemen, dan penerapan teknologi modern yang diasumsikan dapat diterapkan baik pada dunia bisnis maupun dunia administrasi publik sehingga lokus menjadi tidak jelas.

- Paradigma 5: Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970)

Paradigma ini telah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus Administrasi Publik dalam paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen dan kebijakan publik sedangkan lokus nya adalah masalah-masalah dan kepentingan publik. Ikeanyibe dkk (2017) menambahkan paradigma Administrasi Negara yang ke-6 (enam) yang diuraikan seperti berikut ini:

- Paradigma 6 : *Governance* (1990-sekarang)

Konsep paradigma ini merupakan penerjemahan baru dan aplikasi dari akhir tahun 1980 sampai 1990. Menurut Tamayan (dalam Ikeanyibe dkk, 2017), konsep ini dapat dikatakan sebagai praktik dari kekuasaan dan wewenang yang dilakukan oleh para pimpinan politik untuk kesejahteraan warga negara, proses kompleks dimana beberapa sektor masyarakat memegang kekuasaan, dan

memberlakukan serta mengumumkan kebijakan publik yang secara langsung mempengaruhi interaksi manusia dan kelembagaan, ekonomi, serta perkembangan sosial. Selain itu, Stoker (dalam Ikeanyibe dkk, 2017) melanjutkan bahwa terdapat lima proposisi kritis dan dilematis yang kemudian menjadi prinsip paradigma ini yaitu :

1. Jaringan institusi dan aktor dari dalam dan diluar pemerintah
2. Batas yang abu-abu dan tanggungjawab untuk menangani masalah sosial dan ekonomi
3. Ketergantungan kekuasaan diantara institusi yang terlibat dalam aksi kolektif
4. Jaringan aktor otonom yang mengatur diri sendiri
5. Kapasitas untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak bergantung pada kekuatan pemerintah untuk memerintahkan atau mengguakan wewenangnya.

Gibson (dalam Ikeanyibe dkk, 2017) mengamati bahwa terdapat banyak bentuk dari paradigma governance (tata kelola) yang didokumentasikan dalam literatur. Setiap model *governance* (tata kelola) mengusulkan penekanan yang berbeda yang kurang atau lebih bergantung pada konteks lokal. Beberapa model ini terdiri dari sebagai berikut:

1) *Governance as Government* (Pemerintahan sebagai pemerintah)

Pada konteks ini berkaitan dengan penjelasan keberadaan dari masyarakat, pihak ketiga, dan keterlibatan mereka dalam proses pemerintahan telah ada mulai dari administrasi publik pada era tradisional. Dalam pendekatan ini,

pemerintah tetap menjadi pemegang inisiatif dalam hal mengintegrasikan aktor-aktor lainnya dalam mencapai tujuan pemerintahan.

2) *Good Governance* (Tata kelola pemerintahan yang baik)

Model ini menekankan pada pentingnya peranan dari pemerintah untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan kepentingan publik melalui kepemimpinan yang efektif dan visioner, integritas, transparansi dan akuntabilitas.

3) *Governance as Good Enough Governance* (Pemerintahan sebagai tata kelola pemerintahan yang cukup baik)

Model ini merupakan konsep dan model alternatif yang diperkenalkan oleh Merilee Grindle dalam tulisannya mengenai penekanan dalam *good governance*. Tata kelola yang cukup baik berkaitan dengan kontribusi intervensi dalam perkembangan politik dan ekonomi perlu dipertanyakan, diprioritaskan, dan relevan dengan kondisi negara tersebut. Pemerintah sebagai tata kelola pemerintahan yang cukup baik tidak membahas mengenai jalan pintas mengenai pembangunan, pengembangan kebijakan, implementasi program, pemberian layanan ataupun isu-isu dalam *good governance*. Konsep ini hanya mengadvokasi penggunaan pendekatan inkremental dan kontinjensi dalam prioritas dalam mengejar tata pemerintahan yang baik mengingat kenyataan keterbatasan sumber daya uang, waktu, pengetahuan, dan kapasitas manusia dan organisasi.

4) Kolaborasi, Kemitraan, dan Jaringan Pemerintahan.

Model baru dari pemerintahan ini menekankan pada fungsi jaringan, kemitraan, kolaborasi, serta banyak hal lain yang menggaris bawahi pemerintahan sebagai keterlibatan eksternal daripada proses internal, organisasi, uang, waktu, pengetahuan, kapasitas manusia, dan organisasi.

Penelitian ini menerapkan paradigma 6, yaitu paradigma *Governance*. Dimana fokus yang diteliti, yaitu Kebijakan Pencegahan *Stunting* merupakan wujud upaya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang menekankan kolaborasi manajemen pemerintah, organisasi sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat agar dapat berjalan sesuai dengan fungsi pemerintahan

1.5.4 Kebijakan Publik

Dalam Wahab (2015) mengutip dari Eystone (1971: 18) merumuskan bahwa kebijakan publik ialah antar hubungan yang berlangsung di antara unit/satuan pemerintahan dengan lingkungannya. Menurut W.I. Jenkins (1978: 15), kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut. Sementara itu, Thomas R. Dye (1987: 1), kebijakan publik ialah pilihan tindakan apa pun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah.

Dalam Nugroho (2006) mengutip dari James Lester dan Robert Steward (2000, 18) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu proses atau serangkaian

atau pola kegiatan atau keputusan pemerintah yang dirancang untuk mengatasi suatu masalah publik, baik yang nyata maupun yang dibayangkan. James Anderson (2000, 4) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang relatif stabil dan bertujuan yang diikuti oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dalam menangani suatu masalah atau hal yang menjadi perhatian.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William N. Dunn dalam Winarno (2014: 32-34) sebagai berikut :

1) Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik, sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2) Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik, pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada, dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah dalam

tahap ini masing-masing aktor bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3) Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

4) Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan saling bersaing.

5) Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Tahap ini kebijakan yang telah dijalankan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

1.5.5 Implementasi

Kebijakan yang baik bukan hanya ditentukan pada saat proses perumusan dan pembuatan kebijakan itu sendiri, melainkan hal yang paling penting adalah pada saat menjalankan kebijakan itu, karena implementasi kebijakan pada umumnya lebih sulit dari proses perumusannya sehingga tidak semua kebijakan akan berhasil diimplementasikan. Implementasi kebijakan melibatkan upaya-upaya dari pembuat kebijakan (*policy maker*) untuk mempengaruhi perilaku birokrat agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran (Subarsono 2010: 87).

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975: 447) dalam Hamdi (2015) menyatakan bahwa implementasi kebijakan mencakup semua tindakan oleh perorangan atau kelompok publik dan privat yang diarahkan pada perwujudan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dalam keputusan kebijakan. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) dalam Wahab (2015) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa, memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Riant Nugroho (2014:680-681), ada beberapa pendekatan dalam implementasi kebijakan publik. Pendekatan pertama adalah pendekatan secara *top-down*, yaitu pendekatan secara satu pihak dari atas ke bawah. Dalam proses

implementasi peranan pemerintah sangat besar. Pada pendekatan ini asumsi yang terjadi adalah para pembuat kebijakan keputusan merupakan aktor kunci dalam keberhasilan implementasi sedangkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses implementasi dianggap menghambat, sehingga para pembuat keputusan meremehkan inisiatif strategi yang berasal dari level birokrasi rendah maupun subsistem-subsistem kebijaksanaan yang lain.

Pendekatan kedua adalah pendekatan secara *bottom-up*, yaitu pendekatan yang berasal dari bawah (masyarakat). Pendekatan *bottom-up* didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintahan namun hanya di tataran rendah. Asumsi yang mendasari pendekatan ini adalah bahwa implementasi berlangsung dalam lingkungan pembuat keputusan yang terdesentralisasi. Model ini menyediakan suatu mekanisme untuk bergerak dari level birokrasi paling bawah sampai pada pembuatan keputusan tertinggi di sektor publik maupun sektor privat.

1.5.6 Model Implementasi

1. Implementasi Kebijakan Model Donald van Metter & Carl van Horn

Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh van Metter & van Horn disebut dengan istilah *A Model of The Policy Implementation*. Menurut van Metter & van Horn dalam (Leo Agustino, 2016) Proses implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini

mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel, menurut van Metter & van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2) Sumber daya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau-tidak-mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia

sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

3) Karakteristik Agen Pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4) Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah

hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan 'dari atas' (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

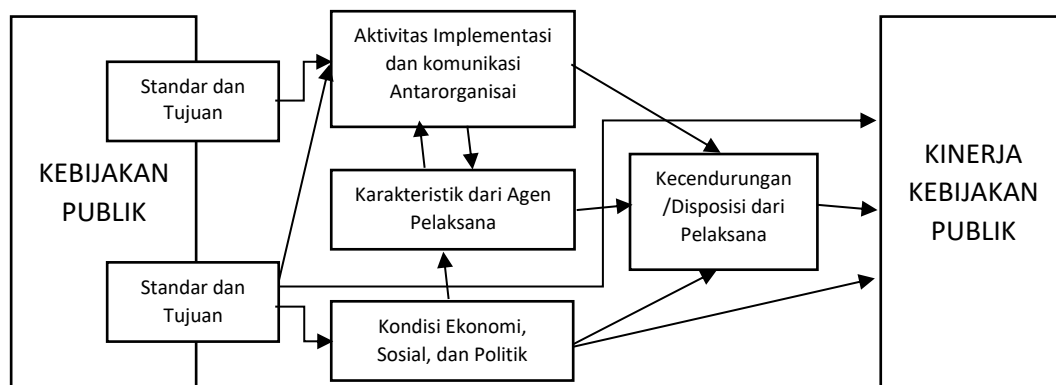
5) Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Meter & van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Gambar 1.5 Model Pendekatan *The Policy Implementation Process*



Sumber: van Metter & van Horn dalam Leo Agustino (2016:136)

2. Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III

Model implementasi kebijakan yang berperspektif *top-down* dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Menurut Edward III dalam (Agustino, 2016) terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (i) komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi.

1) Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut komunikasi. Edward III, adalah Komunikasi, menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau

dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisi informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:

- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
- c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2) Sumber Daya

Variabel kedua yang mempengaruhi kebijakan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c. Wewenang: pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika

wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

- d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3) Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik bagi George C. Edward III adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III, adalah:

- a. Efek Disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b. Melakukan Pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*), dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi bermuara pada yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *by passing personil*.
- c. Insentif, Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

4) Struktur Birokrasi

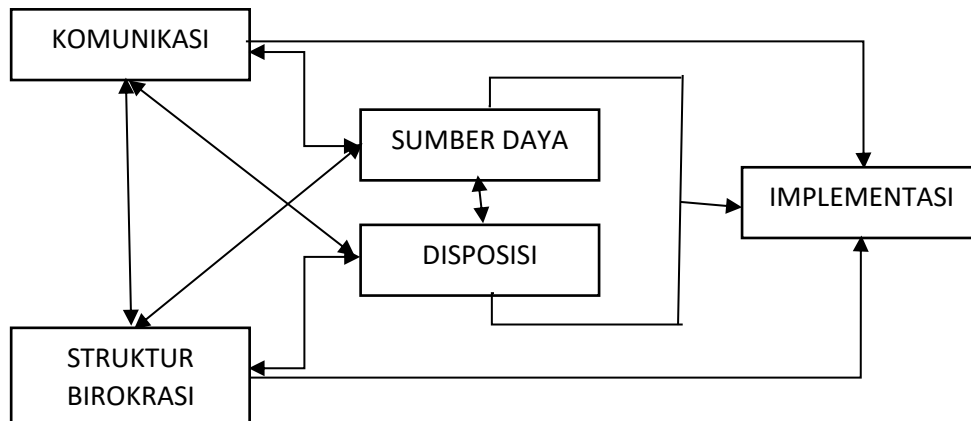
Menurut George C. Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah:

- a. Membuat *Standar Operating Procedures* (SOPs) yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (*days-to-days politics*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
- b. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggungjawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang

sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Gambar 1.6 Model Pendekatan *Direct and Indirect Impact on*



Sumber: Edward III dalam Leo Agustino (2016:142).

3. Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grindle

Model Merilee S. Grindle (1980) pendekatannya dikenal dengan nama *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle dalam (Agustino, 2016) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut:

- 1) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- 2) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.

- b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle juga amat ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy* (1980: 5).

1) *Content of Policy* menurut Grindle adalah:

- a. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

- b. *Type of Benefits* (tipe manfaat)

Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

- c. *Extent of Change Envision* (tingkat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. *Program Implementor* (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

f. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2) *Context of Policy* menurut Grindle adalah:

a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dari api.

b. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan di mana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Gambar 1.7 Penerapan Model Pendekatan sebagai Proses Politik dan Administratif



Sumber: Grindle dalam Agustino (2016:146)

4. Implementasi Kebijakan Model Daniel H. Mazmanian & Paul A. Sabatier

Model implementasi kebijakan publik yang lain ditawarkan oleh Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier. Model implementasi yang ditawarkan mereka disebut dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Mazmanian & Paul A. Sabatier dalam (Agustino, 2016) berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu:

1) Mudah atau Tidaknya Masalah yang akan Digarap, meliputi:

a. Kesukaran-kesukaran Teknis.

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk di antaranya: kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah. Di samping itu, tingkat keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi juga oleh tersedianya atau telah dikembangkannya teknik-teknik tertentu.

b. Keberagaman Perilaku yang Diatur.

Semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin beragam pelayanan yang diberikan sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas. Dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang

harus dikontrol oleh para pejabat pada pelaksana (aparatur, administratur, atau birokrat) di lapangan.

c. Persentase Totalitas Penduduk yang Tercakup dalam Kelompok Sasaran.

Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan), maka semakin besar peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan dengannya akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan.

2) Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang Dikehendaki.

Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, maka semakin sukar atau sulit para pelaksana mencapai keberhasilan. Artinya, ada sejumlah masalah yang jauh lebih dapat kita kendalikan jika tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidaklah terlalu besar.

3) Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat.

Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara:

a. Kecermatan dan Kejelasan Penjenjangan Tujuan-tujuan Resmi yang akan Dicapai.

Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk- petunjuk yang cermat dan disusun secara jelas skala prioritas atau urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor lainnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa output kebijakan dari badan-badan pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut.

b. Keterandalan Teori Kausalitas yang Diperlukan.

Memuat suatu teori kausalitas yang menjelaskan bagaimana kira-kira tujuan usaha pembaharuan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan.

c. Ketetapan Alokasi Sumber Dana.

Tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal.

d. Keterpaduan Hirarki di Dalam Lingkungan dan di Antara Lembaga-lembaga atau Instansi-instansi Pelaksana.

Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundangan yang baik ialah kemampuannya untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana. Ketika kemampuan untuk menyatupadukan dinas, badan, dan lembaga alpa dilaksanakan, maka koordinasi antar-instansi yang bertujuan mempermudah jalannya implementasi kebijakan justru akan membuyarkan tujuan dari kebijakan: yang telah ditetapkan.

e. Aturan-aturan Pelaksana. Pembuat Keputusan dari Badan-badan

Selain dapat memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, memperkecil jumlah titik-titik veto, dan intensif yang memadai bagi kepatuhan kelompok sasaran, suatu undang-undang harus pula dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

f. Kesepakatan Para Pejabat Terhadap Tujuan yang Termaktub dalam Undang-undang.

Para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang diisyaratkan demi tercapainya tujuan. Hal ini sangat signifikan halnya, oleh karena, top-down policy bukanlah perkara yang mudah untuk diimplankan pada para pejabat pelaksana di level lokal.

g. Akses Formal Pihak-pihak Luar.

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sejauh mana peluang-peluang yang terbuka bagi partisipasi para aktor di luar badan pelaksana dapat mendukung tujuan resmi. Ini maksudnya agar kontrol pada para pejabat pelaksanaan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

4) Variabel-variabel di Luar Undang-undang yang Mempengaruhi Implementasi.

a. Kondisi Sosial-Ekonomi dan Teknologi.

Perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah-wilayah hukum pemerintah dalam hal kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi sangat signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang-undang. Karena itu, eksternal faktor juga menjadi hal penting untuk diperhatikan guna keberhasilan suatu upaya pengejawantahan suatu kebijakan publik.

b. Dukungan Publik.

Hakikat perhatian publik yang bersifat sesaat menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu

implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya sentuhan dukungan dari warga. Karena itu, mekanisme partisipasi publik sangat penting artinya dalam proses pelaksanaan kebijakan publik di lapangan.

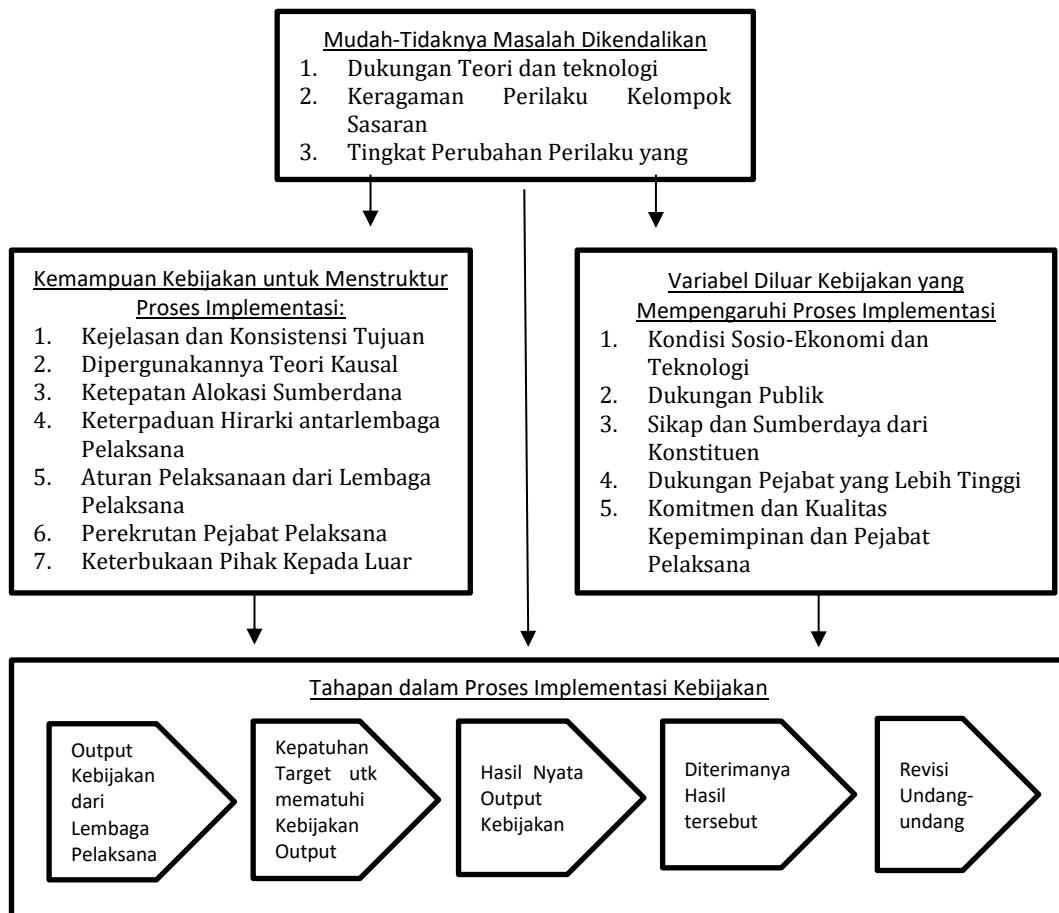
c. Sikap dan Sumber-sumber yang Dimiliki Kelompok Masyarakat.

Perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik akan sangat berhasil apabila di tingkat masyarakat, warga memiliki sumber-sumber dan sikap-sikap masyarakat yang kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan pada mereka. Ada semacam *local genius* (kearifan lokal) yang dimiliki oleh warga yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan implementasi kebijakan dan hal tersebut sangat dipengaruhi oleh sikap dan sumber yang dimiliki oleh warga masyarakat.

d. Kesepakatan dan Kemampuan Kepemimpinan Para Pejabat Pelaksana.

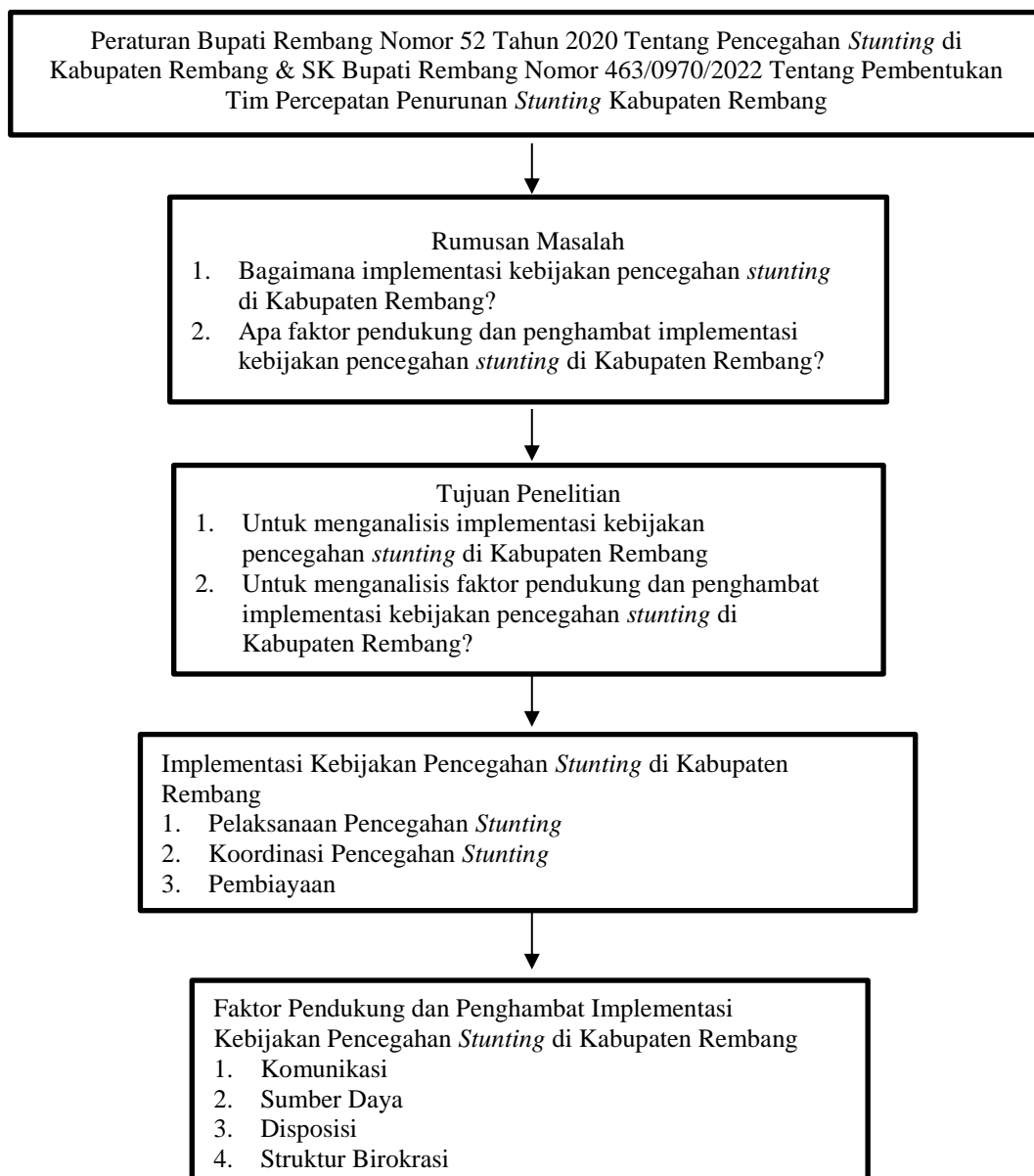
Kesepakatan para pejabat instansi merupakan fungsi dari kemampuan undang-undang untuk melembagakan pengaruhnya pada badan-badan pelaksana melalui penyeleksian institusi-institusi dan pejabat-pejabat terasnya. Selain itu, kemampuan berinteraksi antar lembaga atau individu di dalam lembaga untuk menyukseskan implementasi kebijakan menjadi hal penting atas keberhasilan kinerja kebijakan publik.

Gambar 1.8 Model Pendekatan A *Framework for Implementation Analysis*



Sumber: Mazmanian & Sabatier dalam Agustino (2016:152)

1.5.7 Kerangka Pemikiran



1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Implementasi Kebijakan Pencegahan *Stunting*

Implementasi kebijakan pencegahan *stunting* adalah pelaksanaan kebijakan yang dilakukan secara terkoordinir dan bersama-sama dalam upaya untuk mencegah dan menurunkan angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Rembang.

Analisis implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang dapat dilihat melalui fenomena sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pencegahan *Stunting*

Pelaksanaan pencegahan *stunting* merupakan serangkaian program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam upaya pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang. Gejala yang dapat diamati adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan peningkatan perbaikan asupan gizi pada ibu hamil dan balita.
- b. Pelaksanaan peningkatan perbaikan aksesibilitas air bersih, sanitasi rumah, dan lingkungan.
- c. Pelaksanaan peningkatan dan penguatan pola asuh dalam keluarga dan masyarakat.

2. Koordinasi Pencegahan *Stunting*

Koordinasi pencegahan *stunting* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang untuk mengatur berbagai kegiatan, sehingga pelaksanaan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang berjalan dengan sukses. Gejala yang dapat diamati adalah sebagai berikut :

- a. Koordinasi Sosialisasi.
- b. Koordinasi Fasilitasi.
- c. Koordinasi Pembinaan.
- d. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi.

3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam upaya pelaksanaan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang. Gejala yang dapat diamati adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Anggaran
- b. Alokasi Anggaran

1.6.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pencegahan *Stunting*

Pada implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang terdapat faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat melalui fenomena sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi pada implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang dapat diamati dari beberapa gejala berikut ini :

- a. Transmisi
- b. Kejelasan
- c. Konsistensi

2. Sumber daya

Sumber daya pada implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang dapat diamati dari beberapa gejala berikut ini :

- a. Staf
- b. Informasi

c. Wewenang

d. Fasilitas

3. Disposisi

Disposisi pada implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang dapat diamati dari beberapa gejala berikut ini :

a. Efek Disposisi

b. Pengaturan Birokrasi

c. Insentif

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi pada implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang dapat diamati dari beberapa gejala berikut ini :

a. *Standart Operating Procedures* (SOPs)

b. Fragmentasi

1.7 Argumen Penelitian

Anak balita yang mengalami *stunting* akibat gizi buruk kronis, khususnya pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), mengalami pertumbuhan terhambat. Jika tinggi atau panjang badan seorang anak berada di bawah pedoman nasional yang berlaku untuk usianya, maka ia dianggap *stunting*. Menurut hasil SKI pada tahun 2023, Kabupaten Rembang menduduki peringkat ke-21 dengan prevalensi *stunting* tertinggi di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kabupaten dengan angka 19,5%, sedangkan menurut data e-PPGBM, prevalensi *stunting* di Kabupaten Rembang tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,75% yang semula pada tahun 2022 sebesar 11,81% menjadi 13,56%, Selain itu, masih banyaknya

angka Keluarga Berisiko *Stunting* di Kabupaten Rembang pada tahun 2023 sebanyak 15.695 KRS menyebabkan risiko *stunting* di Kabupaten Rembang masih tinggi. Selain itu, untuk melaksanakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Rembang, pada 2021 Pemerintah Kabupaten Rembang menganggarkan dana sebesar Rp12.796.183.338,00 dan realisasi anggarannya sebesar Rp11.288.478.677,00. Sedangkan pada 2022 jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp47.014.517.811,00 dan realisasi anggarannya sebesar Rp44.116.102.259,00.

Pada penelitian ini fenomena yang muncul dalam implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang adalah Pelaksanaan Pencegahan *Stunting*, Koordinasi Pencegahan *Stunting*; dan Pembiayaan. Dari fenomena tersebut menarik perhatian peneliti untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang, sekaligus faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Pasolong dalam Metode Penelitian Administrasi Publik (2012:75), penelitian deskriptif diartikan sebuah penelitian dengan melakukan penggambaran terhadap kondisi yang terjadi ketika penelitian berlangsung. Dalam tipe ini dilangsungkan upaya dalam menggambarkan, membuat sebuah catatan, melakukan penganalisaan, serta penginterpretasian ke dalam situasi saat ini. Dengan diterapkannya tipe penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mendapatkan sejumlah informasi aktual dan

meninjau hubungan di antara variabel terkait. Di dalam penelitian ini tidak dilangsungkan pengujian terhadap hipotesa melainkan memaparkannya ke dalam bentuk informasi yang bernilai obyektif.

1.8.2 Situs Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rembang, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Rembang, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DinsosPPKB) Kabupaten Rembang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinpermades) Kabupaten Rembang, dan Dinas Pembangunan Umum dan Tata Ruang (DPU TARU) Kabupaten Rembang.

1.8.3 Fokus dan Fenomena Penelitian

Tabel 1.3. Fokus dan Fenomena Penelitian

No.	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang diamati
1.	Implementasi Kebijakan Pencegahan <i>Stunting</i> di Kabupaten Rembang	Pelaksanaan Pencegahan <i>Stunting</i>	1. Pelaksanaan peningkatan perbaikan asupan gizi pada ibu hamil dan balita 2. Pelaksanaan peningkatan perbaikan aksesibilitas air bersih, sanitasi rumah, dan lingkungan 3. Pelaksanaan peningkatan dan penguatan pola asuh dalam keluarga dan masyarakat
		Koordinasi Pencegahan <i>Stunting</i>	1. Koordinasi Sosialisasi 2. Koordinasi Fasilitasi 3. Koordinasi Pembinaan 4. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi
		Pembiayaan	1. Jumlah Anggaran 2. Alokasi Anggaran
2.	Faktor Pendukung dan Penghambat	Komunikasi	1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi
		Sumber Daya	1. Staf

Implementasi Kebijakan Pencegahan <i>Stunting</i> di Kabupaten Rembang		2. Informasi 3. Wewenang 4. Fasilitas
	Disposisi	1. Efek Disposisi 2. Pengaturan Birokrasi 3. Insentif
	Struktur Birokrasi	1. SOPs 2. Fragmentasi

1.8.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau informan ialah seseorang ataupun sekelompok orang yang akan dimintai keterangan terkait sebuah fakta ataupun pendapat pribadi. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* dan kombinasi dengan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar (Sugiono, 2009: 300). Subjek penelitian yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kabupaten Rembang
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang
3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Dinsosppkb Kabupaten Rembang
4. Satgas *Stunting* pada Dinsosppkb Kabupaten Rembang
5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa pada Dinpermades Kabupaten Rembang

6. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan pada Dinpermades Kabupaten Rembang
7. Subkoordinator Bidang Sanitasi pada DPU TARU Kabupaten Rembang
8. Subkoordinator Bidang Air Minum pada DPU TARU Kabupaten Rembang
9. Masyarakat

1.8.5 Jenis Data

Jenis data yang dipilih peneliti untuk penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu berupa pernyataan-pernyataan faktual yang disajikan dalam bentuk tulisan, kalimat, atau bentuk informatif lainnya.

1.8.6 Sumber Data

Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari tanggapan informan mengenai implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang. Sedangkan data sekunder penelitian ini berasal dari berbagai sumber antara lain buku, jurnal, majalah, artikel, dan dokumen resmi dari lembaga terkait yang bertugas dalam pelaksanaan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang.

1.8.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena bertujuan untuk mendapatkan data (Sugiyono, 2016 :101). Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang diharapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek penelitian, dan selanjutnya mengadakan pencatatan terhadap gejala-gejala yang ditemukan dilapangan. Dalam penelitian ini pengamatan dilakukan secara terus terang dengan mengungkapkan maksud dan tujuan untuk melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihak yang terkait dengan suatu tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang ada di lokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang terkait dengan objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga penelitian ini akan memperoleh data yang sah dan lengkap. Teknik dokumentasi yang digunakan peneliti, yaitu dalam pengambilan gambar dan rekaman audio wawancara yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil dokumentasi ini dapat dijadikan sebagai arsip pribadi untuk mengumpulkan data dan informasi terkait implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang serta sebagai bukti nyata bahwa penelitian ini telah dilakukan.

1.8.8 Analisis dan Interpretasi Data

1.8.8.1 Analisis Data

Model analisis data yang digunakan peneliti adalah model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 12-14). Komponen dalam analisis data Miles, Huberman dan Saldana adalah sebagai berikut:

1. Kondensasi Data (*data condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris. Kesimpulannya bahwa proses kondensasi data ini diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada di lapangan, yang nantinya transkrip wawancara tersebut dipilah-pilah untuk mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan, dan informasi yang disimpulkan. Penyajian data disini juga membantu dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih mendalam.

3. Penarikan Kesimpulan (*conclusions drawing*)

Penarikan kesimpulan disini dilakukan peneliti dari awal peneliti mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh peneliti.

1.8.8.2 Interpretasi Data

Dalam penelitian ini ulasan atau analisis temuan penelitian dilakukan dengan mengkaji kembali hasil penelitian secara tajam dan aktual dengan teori yang relevan serta informasi akurat yang diperoleh dari lokasi penelitian.

1.8.9 Kualitas Data

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian ini adalah dengan melakukan triangulasi. Ada 3 macam triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data dapat diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara

mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang ada